
Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia

Affandy Yusuf¹⁾, Muh. Hanif^{2)*}

^{1,2)}Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Affandy Yusuf

Email : 234110401002@mhs.uinsaizu.ac.id

muh.hanif@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Desentralisasi telah memberikan dampak positif berupa peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pendidikan, yang seharusnya dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti terbatasnya infrastruktur pendidikan yang memadai, rendahnya kapasitas dan kualitas kompetensi penduduk di berbagai wilayah, serta distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif pengaruh kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak terhadap kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi belum mampu mengatasi ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antar daerah secara signifikan. Penelitian ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lebih berkeadilan, serta dapat tercapainya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Untuk itu, pentingnya membangun kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Selain itu, penguatan sistem manajemen berbasis sekolah diperlukan dalam mengelola sumber daya secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata kunci: Desentralisasi Pendidikan, Ketimpangan Akses, Pemerataan Kualitas

Abstract

Decentralization has had a positive impact in the form of increasing regional participation in the management and decision-making process related to education, which should be able to accelerate the equalization of education quality in Indonesia. This inequality is influenced by several main factors, such as limited adequate education infrastructure, low capacity and quality of population competence in various regions, and uneven distribution of education budgets. This study aims to conduct a comprehensive analysis of the influence of education decentralization policies on inequality of access to education in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method, which aims to explore a deeper understanding of how education decentralization policies impact the gap in access to education between regions. The results of the study show that decentralization policies have not been able to significantly overcome the inequality of access and quality of education between regions. This study is an important foundation for designing education policies that are more in line with the needs of local communities. More equitable, and can achieve equal distribution of quality education in Indonesia. For this reason, it is important to build closer cooperation between the central government and local governments in education policy planning. In addition, strengthening the school-based management system is needed to manage resources effectively, innovatively, and sustainably. This research provides an important foundation for designing education policies that are more adaptive, responsive to local needs, and oriented towards social justice.

Keywords: Decentralization of Education, Inequality of Access, Quality Equality

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan mereformasi model pendidikan dari sentralisasi ke arah desentralisasi sebagai imbas dari adanya reformasi. Kebijakan ini bertujuan agar masing-masing lembaga pendidikan memiliki wewenang sendiri dalam mengelola proses pendidikannya secara mandiri (Syed Agung Afandi, M. Fajar Anugerah, 2023). Namun kebijakan desentralisasi dapat berujung pada ketimpangan pendidikan yang berhubungan langsung dengan kesenjangan informasi, sehingga dilakukan penggalangan digitalisasi pendidikan. Kesenjangan

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

teknologi informasi sering terjadi antara sekolah perkotaan dan sekolah di daerah terpencil, sehingga muncul ketimpangan yang signifikan (Miftah & Fahrurrozi, 2022). Pemerataan pendidikan hadir sebagai alternatif solusi adanya ketimpangan pendidikan yang berujung pada buruknya kualitas pendidikan (Agil, 2020).

Desentralisasi pendidikan memang membuka peluang bagi peningkatan partisipasi daerah dalam mengelola pendidikan. Meski demikian, kebijakan ini juga dapat menyebabkan ketidakmerataan, terutama terkait pembiayaan sektor pendidikan dan tata kelola pendidikan yang mengalami perubahan besar. Dalam konteks inilah, pembiayaan menjadi aspek yang sangat krusial karena tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi suatu daerah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Naila & Effane, 2022). Ketimpangan distribusi anggaran terjadi ketika anggaran nasional tidak terbagi secara adil pada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya tentang siapa yang punya harta lebih banyak, tetapi juga tentang siapa yang punya lebih banyak kesempatan terutama dalam hal pendidikan. Mereka yang hidup dengan sumber daya terbatas sering kali menghadapi kesulitan besar untuk mengakses pendidikan yang layak, sementara kelompok berpenghasilan tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk berkembang. Dengan demikian, terdapat pemisah antara masyarakat strata sosial tinggi dan rendah yang semakin luas, serta dalam hal masa depan dan mobilitas sosial. Untuk melihat sejauh mana ketimpangan ini terjadi, Badan Pusat Statistik biasanya menggunakan alat ukur seperti *koefisien Gini* atau *Gini ratio*, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah (Muhammad Sufyan Rabbani et al., 2023).

Penelitian ini juga mengkaji penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam melakukan penelitian serta memperkuat argument yang disajikan. Penelitian (Erdayani et al., 2023) yang menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia dengan fokus pada pelimpahan wewenang mulai dari pemerintah pusat, berlanjut ke daerah, sampai ke lembaga pendidikan. Penelitian ini menggambarkan adanya otonomi pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah dan lembaga pendidikan. Kemudian diperjelas dengan penelitian oleh (Depiska Tritanti Simamora et al., 2024) yang menitikberatkan pada elemen-elemen yang mempengaruhi ketidakseimbangan pembagian anggaran. Dengan demikian akan menimbulkan ketimpangan akses pendidikan yang memperburuk kualitas peserta didik. Penelitian (Nurul Indika Wardhani & Supriyanto, 2023) yang membahas pemerataan kualitas pendidikan di lingkungan kampus. Perguruan tinggi juga memerlukan pemerataan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (D. R. Sari & Trisoni, 2023) menunjukkan bahwa SMA Negeri 6 Batang Hari adalah sekolah yang sudah mengimplementasikan desentralisasi pendidikan secara efektif. Meskipun demikian, penerapan desentralisasi pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari perlu dianalisis karena masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapannya, karena memiliki dampak positif dan negatif. Penelitian lain seperti dalam (Darma, 2024) menjelaskan peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan lebih khususnya untuk daerah terpencil yang memerlukan manajemen pendidikan yang baik. Terakhir menurut cahyani dalam (Darma, 2024) menekankan manajemen pendidikan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik agar adanya kualitas pendidikan yang merata. Dalam penelitian ini akan membahas dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan yang berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak terhadap kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Untuk mengumpulkan data, penulis mengandalkan kajian pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai publikasi ilmiah yang relevan

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

dengan topik. Selain itu, penulis juga melakukan analisis dan studi literatur untuk menganalisis berbagai kajian pustaka sehingga menghasilkan suatu bahasan yang bermanfaat.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dalam tiga tahap utama, yaitu: menyederhanakan data (reduksi), menyajikan data secara sistematis, dan menarik kesimpulan. Untuk memastikan keakuratan informasi, penulis juga melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta melakukan analisis mendalam untuk mendapat informasi yang akurat. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih utuh dan tajam mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, khususnya dalam konteks ketimpangan akses antar wilayah. Implikasi utama penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah ketimpangan pendidikan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dari (Erdayani et al., 2023) berfokus pada pemberian wewenang mulai dari pemerintah pusat, berlanjut ke daerah, sampai ke lembaga pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya percepatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Menurut (Rafid et al., 2024) pengelolaan pendidikan secara desentralisasi dinilai lebih efektif karena memudahkan pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengontrol perkembangan pendidikan. Pendapatnya dikuatkan oleh (Setiawan, 2020) menuturkan ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah disahkan, Indonesia memasuki babak baru dalam pola pembangunan dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik (DPR RI, 1999). Perubahan besar ini juga menyentuh sektor pendidikan, yang kemudian turut mengalami desentralisasi. Adanya desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan tersebut diharapkan bisa memberikan implikasi yang baik bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan lama seperti rendahnya mutu pendidikan. Lebih dari itu, desentralisasi pendidikan juga dilihat sebagai salah satu kunci penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia tahun 2045, menjadi negara berpendapatan tinggi yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman Tanjung, Hanafiah, Opan Arifudin, 2022) menunjukkan bahwa dalam memimpin satuan pendidikan, kepala sekolah perlu menjalankan fungsi manajerialnya dengan menyesuaikan pada budaya dan kondisi sekolah serta tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dibutuhkan langkah-langkah nyata, seperti memilih metode pembelajaran yang tepat, mengelola anggaran secara efektif, memanfaatkan teknologi yang relevan, serta menyusun materi ajar yang bermutu. Selain itu, kepala sekolah harus memiliki pemahaman tentang dinamika perubahan agar bisa membawa lembaganya menuju arah yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kebijakan desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengalihkan sebagian wewenang dan akuntabilitas mulai dari pemerintah pusat berlanjut ke pemerintah daerah. Tujuannya sederhananya yaitu agar daerah bisa lebih leluasa merancang dan mengelola pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas lokal. Dengan begitu, pendidikan tidak lagi bersifat seragam dari pusat, tetapi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Menurut (Saprianto et al., 2023) menuturkan terdapat beberapa aspek utama dalam kebijakan ini yaitu:

1. Pemerintah daerah memperoleh wewenang untuk mengelola dan menerapkan kebijakan pendidikan, termasuk mengelola anggaran serta menyusun kurikulum lokal.
2. Pengelolaan anggaran menjadi lebih fleksibel, di mana anggaran pendidikan langsung disalurkan ke daerah, memberi mereka kebebasan untuk menentukan prioritas pengeluaran

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat dan mengefisienkan penggunaan anggaran.

3. Terkait dengan kurikulum, pemerintah daerah berkesempatan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan nilai-nilai lokal serta kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan proses belajar yang lebih relevan dan terhubung dengan realitas peserta didik.
4. Desentralisasi juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di wilayahnya.
5. Kebijakan ini berpotensi membuka peluang pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.
6. Peningkatan dalam akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, warga lokal bisa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pendidikan.

Meskipun desentralisasi pendidikan membawa harapan besar bagi kualitas sumber daya manusia, namun pelaksanaannya juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi bersama. Masalah ketimpangan antar daerah yang sudah maju biasanya lebih siap dan mampu memanfaatkan kebijakan ini, sementara daerah yang masih tertinggal justru bisa semakin kesulitan baik dalam hal pendanaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Tidak semua daerah memiliki tim yang cukup terlatih untuk mengatur sistem pendidikan secara optimal. Hal ini bisa memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Dengan otonomi di tangan masing-masing daerah, diharapkan dapat menjaga agar standar pendidikan tetap konsisten dan merata di seluruh wilayah. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebijakan tetap selaras dan tujuan nasional pendidikan tetap tercapai (Saputra & Ahmad, 2022).

Sebelum diberlakukannya otonomi pendidikan, sistem pendidikan nasional dijalankan secara birokratis dan terpusat. Sekolah hanya berperan sebagai pelaksana sangat bergantung pada keputusan pusat yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun kini sekolah memiliki otonomi lebih besar, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah masih tinggi dan di tingkat internasional, capaian pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan berbagai negara di Asia Tenggara. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengelolaan otonomi sekolah oleh tenaga pendidik dan kependidikan, ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah. Padahal, di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, perbaikan sistem pendidikan nasional sangat dibutuhkan agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul (Idris, 2020).

Otonomi sebenarnya memberi ruang bagi lembaga untuk mengelola kurikulum yang selaras dengan kebutuhan siswa dan kondisi setempat. Sebagai pemimpin, kepala sekolah memegang peranan penting dalam mendorong inovasi dan semangat guru. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kurikulum yang cepat perlu dihadapi dengan pendekatan terpadu, termasuk pemberdayaan guru, keterlibatan orang tua dan masyarakat, peningkatan kompetensi program pelatihan dan pengembangan profesional, serta dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian sekolah akan lebih memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif dan inklusif. Jika dikelola dengan tepat, otonomi sekolah dapat menjadi dasar yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia (Nasir et al., 2023).

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi pendidikan terbagi ke dalam dua bentuk yaitu kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Desentralisasi dengan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berkaitan dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan maupun pengelolaan pendanaannya. Sedangkan, desentralisasi yang lebih menitikberatkan pada pemberian kewenangan langsung kepada satuan atau lembaga pendidikan, memberikan ruang lebih besar bagi sekolah untuk mengatur dan mengembangkan proses

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya (Ishak, 2022). Menurut (Iskandar, 2021) menuturkan bahwa pemberian otoritas yang lebih luas kepada lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan otonomi yang ada, sekolah memiliki kebebasan untuk mengelola berbagai aspek pendidikan, mulai dari perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan proses belajar mengajar, manajemen tenaga pengajar, hingga pengelolaan fasilitas dan peserta didik (Sari & Yanti, 2023).

Menurut (Nurhamidah, & Cecep Hilman, 2022) menerangkan bahwa pendidikan salah satu pondasi utama dalam mendukung adanya perubahan pembangunan bangsa. Menurutnya salah satu metode atau kebijakan yang efektif dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang kita tahu bersama kewenangan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar ada di bawah pemerintah kabupaten/ kota. Sedangkan sekolah menengah atas atau sederajat dibawah kewenangan pemerintah provinsi. Akan tetapi untuk perguruan tinggi masih dibawah kewenangan pemerintah pusat sehingga kebijakan bersifat sentralistik. Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan yang berkaitan dengan otonomi daerah baru diterapkan untuk sekolah dasar dan menengah. Kewenangan pendidikan untuk perguruan tinggi masih bersifat sentralistik karena dibawah naungan pemerintah pusat. Namun untuk kewenangan dalam mengembangkan kurikulum nasional sudah dilimpahkan kepada masing-masing sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Bentuk utama desentralisasi pendidikan menurut (Sulistiawati, 2024) terbagi dalam tiga macam yaitu:

1. Dekonsentrasi merupakan bentuk desentralisasi yang paling ringan karena pemerintah pusat hanya memindahkan tanggung jawab manajerial kepada pejabat atau lembaga di tingkat daerah, tetapi kontrol utama tetap ada di pusat. Meskipun pelaksanaannya dilakukan di daerah, keputusan strategis tetap dipegang oleh pusat.
2. Delegasi terjadi ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan dibawahnya atau lembaga semi-pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu. Namun, kewenangan ini tetap dapat dicabut kapan saja oleh pemerintah pusat. Bentuk ini umumnya mengaitkan pembagian tugas operasional, meskipun otoritas pusat tetap menjadi pengendali utama.
3. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling menyeluruh. Dalam model ini, pemerintah pusat sepenuhnya menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Daerah diberikan kebebasan besar untuk membuat keputusan dan tata kelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan, tanpa harus terus bergantung pada pusat. Artinya, pemerintah daerah memiliki otonomi penuh, dan pemerintah pusat tidak lagi mengendalikan secara langsung.

Ketiga bentuk diatas menggambarkan tingkatan atau hierarki desentralisasi pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari yang ringan sampai yang berat. Bentuk-bentuk tersebut diharapkan masing-masing pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan memiliki akuntabilitas dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun menurut (Bida, 2021) kebijakan desentralisasi atau peralihan dari sentralistik ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah ketimpangan pembangunan di masyarakat. Pendapatnya tidak hanya terjadi di masyarakat saja, akan tetapi di bidang pendidikan juga masih ditemui banyak sekali hambatan dan tantangan dalam pengelolanya. Hal demikian terjadi karena penggunaan kewenangan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan belum dilakukan secara optimal.

Penerapan desentralisasi pendidikan harus diimbangi dengan beberapa aspek kebijakan diantaranya yaitu kebijakan efisiensi, efektivitas, relevansi (kesesuaian), dan kualitas kurikulum (Khaidir et al., 2023). Desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang baik bagi pendidikan di masyarakat sebagai langkah preventif adanya fenomena anak putus sekolah. Dengan adanya kebijakan ini pihak sekolah dapat dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan di masing-masing lembaga pendidikannya. Sehingga pemenuhan standarisasi

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut dapat tercapai. Kearifan lokal setempat menjadi terangkat karena kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi pihak sekolah untuk menginovasi kurikulum nasional dalam proses pembelajaran. Dengan demikian pendidikan dapat bersifat adil dan setara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Imam Rohani, 2020) dalam menganalisis kebijakan pendidikan, penting untuk memperhatikan dua hal utama yang berkaitan erat dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pendidikan memungkinkan tidak ada rakyat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, tidak mampu membaca atau menulis, serta tertinggal karena lemahnya akses terhadap pendidikan. Seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Dengan penerapan kebijakan otonomi dalam pendidikan yang telah diterapkan selama ini, Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang setara dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi tempat tujuan belajar bagi masyarakat internasional. Kedua, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya pada aspek intelektual, namun meliputi kecerdasan hati dan kemampuan dalam bertindak. Artinya, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berpikir kritis, memiliki empati, serta mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

Reformasi pendidikan di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan kurikulum sentralistik ke desentralistik. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya reformasi pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang diuraikan oleh (Hendra & Fadriati, 2023) yaitu:

1. Kebijakan sentralistik yang bersifat otoriter sehingga mengekang peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran,
2. Sebagai langkah dalam memperbaiki pendidikan nasional yang lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif,
3. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia karena kebijakan sentralisasi pendidikan.

Pemerintah Indonesia menerapkan desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan secara lebih efektif dan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Menurut (Achmad & Hartono, 2021) menyebutkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya diambil alih oleh lembaga pendidikan, melainkan masih kuat ada di kewenangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan otonomi daerah yang diberi kewenangan pengelolaan diberbagai aspek bidang kehidupan. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pasti memiliki sisi baik dan buruk. Dari perspektif yang menguntungkan, kebijakan ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk lebih bebas dalam mengembangkan sumber daya manusia di wilayah mereka. Selain itu, kebijakan ini memberikan peluang kepada lembaga pendidikan untuk mengelola institusinya secara mandiri. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan bagi individu yang memiliki kompetensi tinggi agar dapat memanfaatkan kemampuan mereka secara maksimal untuk memperbaiki tata kelola lembaga. Tentu saja, hal ini memerlukan sosok pemimpin yang berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Desentralisasi pendidikan adalah sebuah isu yang kompleks, sehingga melibatkan beberapa aspek penting yang dituturkan oleh (Maulana et al., 2023) antara lain, penciptaan berbagai kebijakan konkret yang relevan dalam sistem pendidikan, pemanfaatan kebudayaan setempat sebagai dasar pengelolaan sistem pendidikan, penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional, pelatihan sumber daya manusia di lingkungan sekolah, serta pengelolaan sumber daya manusia serta optimalisasi manfaat yang dapat dihasilkan. Penelitian (Depiska Tritanti Simamora et al., 2024) menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pengalokasian anggaran. Anggaran menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan akses pendidikan karena aksesibilitas pendidikan membutuhkan banyak biaya sebagai penunjang ketersediaan akses. Namun menurut (Edo & Yasin, 2024), menerangkan bahwa ketimpangan akses terhadap pendidikan dapat memberikan pengaruh positif bagi kemampuan lembaga pendidikan merintis usaha secara mandiri dan mengoptimalkan setiap peluang ekonomi yang tersedia. Dalam

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

hal ini juga dapat membuat lembaga pendidikan untuk melakukan komersialisasi pendidikan sehingga target utamanya adalah peserta didik.

Ketimpangan pendidikan dapat berdampak baik apabila disikapi dengan langkah strategis dan sistematis, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang solutif. Namun ketimpangan pendidikan dapat berdampak buruk apabila tidak ada respon yang konstruktif dan inovatif sebagai implikasi dalam menghadapi ketimpangan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Edo & Yasin, 2024) menunjukkan adanya kenyataan di sekolah bahwa faktor ekonomi dan strata sosial masyarakat sangat berpengaruh pada efektivitas mobilitas dan akses pendidikan. Menurut (Lailiyah, 2024) menuturkan bahwa di Indonesia, pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran, meningkatkan kompetensi masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meski demikian, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu langkah cerdas yang dapat dilakukan adalah dengan merekrut dan melatih guru-guru berkualitas. Guru yang kompeten, penuh semangat, dan memiliki komitmen tinggi akan sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan.

Pemerintah juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ini, salah satunya dengan menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan. Banyak anak-anak di desa yang berasal dari latar belakang keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sehingga menghadapi kesulitan untuk membiayai pendidikan mereka. Dengan adanya dukungan finansial, peluang mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan menjadi jauh lebih besar. Ketimpangan pendidikan ini, jika dibiarkan, bisa memperlebar jurang antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Untuk itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi langkah penting lainnya. Banyak siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, dari latar belakang etnis tertentu, maupun dari daerah perkotaan padat, seringkali terpinggirkan oleh sistem pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pola pikir lama yang masih meyakini bahwa hanya sebagian orang saja yang layak mendapat kesempatan lebih baik, diperparah lagi dengan ketimpangan ekonomi yang membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas (Anwar, 2022).

Sistem tersebut membuka banyak celah kegagalan bagi guru, siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Siswa-siswa yang terdampak ketimpangan tersebut sering kali mengalami hambatan besar dalam proses belajar mereka dan tidak memiliki peluang yang setara dengan teman-teman mereka yang memiliki kelebihan. Lebih jauh lagi, kesenjangan pendidikan ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan perekonomian kita. Karena di era sekarang, kemajuan ekonomi sangat bergantung pada inovasi dan kecakapan intelektual. Kurangnya pemerataan keberhasilan pendidikan di antara semua siswa berarti kita juga kehilangan banyak potensi untuk memperkuat perekonomian bangsa. Apabila ketimpangan ini dibiarkan, dampaknya bukan cuma terasa di dunia pendidikan, tapi juga memperlebar jarak sosial di masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan perlu ditanamkan lebih luas lagi. Banyak siswa dari keluarga miskin, komunitas etnis tertentu, atau daerah perkotaan padat yang seringkali tertinggal karena sistem pendidikan yang belum sepenuhnya adil. Pola pikir lama yang menganggap hanya sebagian orang yang layak mendapat kesempatan lebih, masih sering membayangi sistem kita, diperparah dengan jurang ekonomi yang makin lebar (Putri et al., 2024).

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Namun, jika penyaluran sumber daya pendidikan tidak merata, ketimpangan dalam dunia pendidikan pun sulit dihindari. Ketidaksetaraan ini bukan hanya memperlambat kemajuan pendidikan itu sendiri, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Di banyak negara berkembang, pemerintah sebenarnya telah berusaha mendorong perubahan dari industri padat karya menuju industri berbasis teknologi. Sayangnya, upaya ini sering terhambat oleh masih lebarnya kesenjangan pendidikan yang makin marak. Transformasi industri bukanlah hal yang mudah karena ketimpangan tersebut, banyak negara masih mengandalkan sektor padat karya, sementara kemampuan sumber daya

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi belum sepenuhnya siap. Di tengah dinamika ini, pasar tenaga kerja menjadi elemen penting yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk benar-benar mengurangi ketimpangan pendidikan, dibutuhkan waktu panjang dan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai faktor dari banyak sisi kehidupan sosial dan ekonomi (Fadhila & Kartiasih, 2024).

Hasil penelitian (Siska & Rudagi, 2021) menghasilkan rumusan mengenai faktor penyebab adanya ketimpangan pendidikan yaitu:

1. Letak geografis lembaga pendidikan di pelosok pedalaman
2. Kurangnya akses internet sehingga terputusnya jaringan informasi
3. Keterbatasan mobilitas bagi peserta didik dalam proses pembelajaran
4. Terdapat guru yang kurang profesional

Ketimpangan pendidikan dengan faktor-faktor tersebut dapat terjadi pada umumnya ada pada daerah 3T yang memiliki keterbatasan akses dan mobilitas. Kurangnya dukungan pemerintah juga menimbulkan banyak sekali masalah yang bermunculan karena kunci utamanya dari pendidikan adalah pemerintah sebagai keputusan final pengelolaan pendidikan. Terdapat tantangan dalam menyelesaikan masalah ketimpangan pendidikan yang diungkapkan oleh (Sari & Riansi, 2024) antara lain keterbatasan aksesibilitas, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan. Identifikasi masalah tersebut maka dapat diambil sebuah solusi berbaur kebijakan, menurut terdapat solusi mengatasi ketimpangan pendidikan diantaranya yaitu pemerintah harus memegang peran penting dalam merancang kebijakan dan program pendidikan yang inklusif. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga perlu menyesuaikan kurikulumnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses melalui pembelajaran jarak jauh. Keikutsertaan orang tua dan masyarakat menjadi kunci dalam mendukung perjalanan pendidikan anak-anak serta menumbuhkan budaya belajar di lingkungan sekitar. Keberhasilan membangun sistem pendidikan yang adil dan berkualitas membutuhkan kerja sama semua pihak. Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita bisa mempersempit ketimpangan pendidikan, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya generasi baru yang lebih siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Ninghardjanti et al., 2023)).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dema & Anne, 2023), kualitas pendidikan di Indonesia bisa ditingkatkan melalui penerapan desentralisasi pendidikan. Kebijakan ini memiliki peran penting, di antaranya membantu mengembangkan kreativitas guru dan staf, serta memberikan mereka pengalaman berharga melalui pelatihan dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi pendidikan, adalah bentuk otonomi di bidang pendidikan, mencakup beberapa model implementasi. Salah satu model tersebut adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui MBS, desentralisasi pendidikan di sekolah dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Penelitian (Nurul Indika Wardhani & Supriyanto, 2023) yang membahas penyebaran mutu pendidikan yang setara bagi semua kalangan di lingkungan kampus. Pemerataan kualitas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi mencakup pemerataan infrastruktur, program pembelajaran, dan tenaga pengajar. Menurut Coleman sebagaimana dikutip oleh (Safarah & Wibowo, 2021), mengungkapkan bahwa gagasan tentang kesetaraan atau pemerataan pendidikan mencakup beberapa hal penting. Pendidikan seharusnya diberikan secara gratis hingga tingkat tertentu, terutama hingga ke tahap yang menjadi pintu masuk utama ke dunia kerja.

Selain itu, semua anak perlu mendapatkan kurikulum umum yang sama dengan menekankan pentingnya menyediakan sekolah yang setara bagi anak-anak dari berbagai latar belakang kehidupan. Tak kalah penting, prinsip kesetaraan juga mencakup perhatian yang adil dalam hal dukungan emosional dan finansial, di mana sumber pendanaan sekolah berasal dari pajak daerah. Pemikiran ini menjadi landasan bagi lahirnya berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pemerataan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak. Sebagian besar penelitian mengenai kesetaraan dalam dunia pendidikan berfokus pada

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

upaya menyamakan akses dan tingkat partisipasi di berbagai jenjang pendidikan formal bagi semua kelompok sosial (Astini, 2020).

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia perlu disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Kenyataannya, masih banyak tantangan yang menghambat upaya untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan merata. Hambatan tersebut bukan hanya datang dari kebijakan pemerintah, tetapi juga muncul dari dalam diri peserta didik dan keluarganya, misalnya persepsi bahwa pendidikan tidak terlalu penting, atau keterbatasan ekonomi yang menghalangi mereka untuk melanjutkan sekolah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penting untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memperluas layanan pendidikan bagi seluruh rakyat. Kedua, tidak semua anak Indonesia bisa menikmati pendidikan karena akses yang masih terbatas dan biaya yang tinggi. Ketiga, masih marak praktik kapitalisme dan nepotisme di dunia pendidikan, yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan. Keempat, pemerintah perlu menargetkan pemerataan pendidikan, setidaknya dengan meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di semua jenjang (Mudrikah et al., 2022)

Ketimpangan dalam dunia pendidikan menjadi salah satu alasan utama diluncurkannya program-program pemerataan dan kesetaraan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan perlu ditempatkan sebagai program strategis nasional, karena dari sinilah pondasi utama menuju Indonesia sebagai negara maju akan dibangun. Mutu pendidikan yang tinggi dalam suatu bangsa berbanding lurus dengan kekuatan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Indonesia harus mengontruksi sistem pendidikan yang menyeluruh dan relevan dengan dinamika zaman, sambil tetap mempertahankan nilai serta norma budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan sistem zonasi dalam seleksi penerimaan siswa baru sebagai upaya nyata untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Tentu saja, seperti setiap kebijakan lainnya, sistem ini memiliki kelebihan sekaligus kekurangan, apalagi mengingat zonasi masih tergolong kebijakan baru. Perbaikan dan penyempurnaan pun masih terus dibutuhkan agar tujuan pemerataan pendidikan bisa benar-benar tercapai (Agil, 2020).

Sistem pendaftaran zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 (BPK, 2017). Aturan ini mengatur tata cara PPDB untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau yang sederajat, termasuk kewajiban sekolah menerapkan sistem zonasi. Melalui sistem ini, sekolah diwajibkan menerima setidaknya 90 persen calon peserta didik yang berdomisili di wilayah terdekat, dengan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga sebagai acuannya. Sementara itu, penentuan radius zona disesuaikan oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan serta mengurangi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah (Saprianto et al., 2023).

Berdasarkan artikel milik (Wahyudi et al., 2022) menyatakan bahwa rendahnya kemampuan siswa dalam membaca menjadi salah satu faktor penyebab yang signifikan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih terbelang rendah. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi peningkatan kualitas pendidikan, seperti kurangnya fasilitas penunjang, kemampuan guru dalam mengembangkan potensi peserta didik, ketidaksesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang masih kurang diperhatikan. Pemerataan pendidikan menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Untuk mendorong perubahan dalam dunia pendidikan, beberapa langkah perlu diambil, di antaranya adalah pelaksanaan supervisi akademik secara rutin, pemerataan fasilitas sekolah yang sesuai dengan standar dan kemajuan teknologi di setiap daerah, serta pemberian pelatihan kepada guru agar lebih optimal dalam membimbing potensi murid. Selain itu, mendorong siswa untuk aktif berorganisasi juga penting untuk memperkuat kemampuan baik dalam aspek teknis maupun sosial mereka. Pembaruan kurikulum yang selaras dengan perkembangan zaman dan kondisi peserta didik saat ini pun menjadi hal yang tidak kalah penting. Pentingnya pemberian insentif atau penghargaan kepada para pendidik sebagai

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

bentuk apresiasi atas peran besar mereka dalam membentuk generasi penerus bangsa. Menurut pandangan (Sumantri et al., 2023), di era modern ini, Indonesia perlu melakukan perbaikan menyeluruh di berbagai bidang, dan pendidikan merupakan salah satu sektor paling mendasar yang harus segera dibenahi agar perubahan yang diharapkan bisa benar-benar terwujud.

Pendidikan memiliki peran sentral sebagai bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang pada gilirannya mampu meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan individu. Dalam jangka panjang, pendidikan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, kenyataannya, ketimpangan dalam tingkat pendidikan antar daerah masih menjadi persoalan di banyak negara. Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa alokasi dana pendidikan serta pembangunan infrastruktur pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dalam menekan ketimpangan pendidikan. Sementara itu, variabel tingkat pendapatan menunjukkan hasil yang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Meski begitu, dampak dari dana dan infrastruktur pendidikan ini masih tergolong kecil, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor lain yang belum tercakup dalam penelitian, seperti tingkat korupsi yang dapat menjadi penghambat penggunaan anggaran pendidikan secara efektif, atau keberadaan sekolah yang belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Temuan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, agar pemahaman mengenai dinamika pendidikan di Indonesia dapat digali lebih mendalam (Sihombing, 2023)

Rendahnya pemerataan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut (Patandung & Panggua, 2022)

1. Pembangunan lembaga pendidikan masih banyak berfokus di wilayah perkotaan, sehingga daerah pedesaan kurang mendapatkan perhatian.
2. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat desa membuat partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan pendidikan menjadi sangat terbatas.
3. Sarana dan prasarana di daerah pedesaan masih jauh dari memadai.
4. Akses terhadap teknologi di pedesaan juga sangat minim dibandingkan dengan di kota, yang semakin memperlebar kesenjangan dalam dunia pendidikan.

Menurut Feigenbaum, kualitas berarti mampu memberikan kepuasan penuh kepada pelanggan (Alfianto & Ilahi, 2022). Sebuah produk dikatakan berkualitas jika mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Sementara itu, Garvin dan Davis menambahkan bahwa kualitas adalah suatu kondisi yang terus berkembang, yang melibatkan produk, sumber daya manusia, proses, tugas, serta lingkungan, dengan tujuan utama untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan (Alfianto & Ilahi, 2022). Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dibutuhkan sebuah proses yang terintegrasi dengan upaya serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan, khususnya sekolah sebagai institusi yang memiliki otonomi, menjadi sangat penting. Selain itu, keterlibatan orang tua dan dukungan dari masyarakat juga memegang peran besar dalam mendorong pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Jerome S. Arcaro dalam (Khaidir et al., 2023) menjelaskan bahwa ada empat komponen penting yang perlu diperhatikan dalam setiap program peningkatan mutu. Pertama, harus ada komitmen kuat untuk berubah, baik dari pihak dewan sekolah maupun para pengelola. Meskipun di awal penerapan perubahan ini mungkin akan muncul berbagai tantangan, pembelajaran dari setiap kegagalan justru menjadi jalan menuju kesuksesan. Kedua, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi sekolah saat ini, agar perubahan yang direncanakan bisa berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan. Ketiga, setiap orang di lingkungan sekolah perlu memiliki visi masa depan yang sama dan jelas, yang akan menjadi pegangan dalam menjaga fokus dan komitmen terhadap program mutu. Keempat, perlu disusun rencana implementasi mutu sekolah yang rinci dan menjadi pedoman untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan.

Pemerintah juga meluncurkan program guru penggerak dalam rangka melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Guru penggerak adalah sosok pendidik yang berperan sebagai

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

pengarah sekaligus pemimpin bagi rekan-rekannya di lingkungan sekolah. Kehadiran guru penggerak mampu membawa perubahan positif, karena berdasarkan hasil penelitian penulis, terbukti bahwa mereka dapat meningkatkan kinerja guru lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini berkontribusi besar dalam menjadikan sekolah lebih unggul dan diminati. Selain itu, guru penggerak juga mendorong terwujudnya kolaborasi antar guru dalam berbagai program pembelajaran. Melalui program guru penggerak, peserta didik mendapatkan lebih banyak kegiatan dan pengalaman belajar yang membangkitkan semangat mereka. Oleh karena itu, peran guru penggerak sangatlah vital dalam dunia pendidikan untuk memastikan mutu pendidikan terus meningkat. Guru penggerak membantu membentuk generasi penerus yang intelektual, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global, sekaligus memperkuat peran guru sebagai motor utama kemajuan bangsa. Tugas utama guru penggerak adalah mendorong perubahan mendasar di setiap ruang kelas, mengawasi proses pembelajaran secara adil, dan memastikan tujuan belajar tercapai secara maksimal (Lubis et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi, yang selama ini dianggap sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan, ternyata malah memperburuk ketimpangan antar daerah dalam banyak kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak dapat dianggap sebagai jawaban instan untuk keadilan pendidikan, kecuali jika diiringi dengan penguatan kapasitas di tingkat lokal. Konsep desentralisasi pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan triangulasi sumber data memperkuat keabsahan temuan, sementara analisis berdasarkan metode Miles dan Huberman mampu menggambarkan dengan jelas kompleksitas hubungan antara otonomi daerah dan ketimpangan akses pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait ruang lingkup data primer, karena lebih banyak mengandalkan kajian pustaka daripada observasi lapangan yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan dengan pendekatan studi kasus di daerah-daerah tertentu, menggunakan metode kuantitatif dan longitudinal, untuk memetakan lebih mendalam dinamika ketimpangan yang timbul akibat desentralisasi dalam konteks lokal yang lebih beragam.

REFERENSI

- Achmad, H.-, & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 307. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.521>
- Agil, N. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 157–167. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAegQICRAC&sg=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW>
- Alfianto, A., & Ilahi, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah. *Amsir Bunga Rampai Journal*, 1(1), 27–40.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Astini, N. K. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19 Diterima. *Jurnal Lampuhyang*, 11(2), 13–25.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

- Dema, W., & Anne, L. (2023). *Desentralisasi Manajemen Sarana Prasarana*. 2, 157–159.
- Depiska Tritanti Simamora, Siallagan, Lasenna Pasaribu, A. R. N., Tesa Simanjuntak, A., Tarigan, J. V., & Simorangkir, S. D. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. 8(10), 502–510.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3), 317–326.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55–68. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>
- Fadhila, S., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 153–170. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.453>
- Hendra, R., & Fadriati. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 143–158. <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang>
- Idris. (2020). Desentralisasi Pendidikan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 155–166.
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 30–36. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.497>
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi Dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 11–24. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i2.1139>
- Khaidir, F., Amran, A., & Noor, I. A. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education Vol.7*, 7(2), 1–27.
- Lailiyah, Z. N. (2024). *ISU ISU KETIDAKSETARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA : STRATEGI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA* ". 1(4), 12–15.
- Lubis, R. R., Amelia, F., Alvionita, E., Nasution, I. E., & Lubis, Y. H. (2023). Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Pemerataan Kualitas Kinerja Guru. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 33(1), 70–82. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v33i1.170>
- Maulana, I., Metriani, L. P., Syahira, F., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6528–6533. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2784>
- Miftah, Z., & Fahrurrozi, F. (2022). Digitalisasi dan Disparitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Ibtida*, 3(02), 149–163. <https://doi.org/10.37850/ibtida.v3i02.361>
- Mudrikah, A., Khorri, A., Holik, A., & Hakim, L. L. (2022). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara. *Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 137–148. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2177>
- Muhammad Sufyan Rabbani, Anissa Nurul Chotimah, & Jemima Fathima Pasha. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpaty*, 1(3), 204–212. <https://doi.org/10.59024/simpaty.v1i3.227>
- Naila, S., & Effane, A. (2022). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1, 84–89. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7715%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/7715/3505>

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 799–816. <https://doi.org/10.62504/mbznza39>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). *Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education*.
- Nurhamidah, Cecep Hilman, S. (2022). *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia*. 2, 41–51.
- Nurul Indika Wardhani, & Supriyanto, A. (2023). Implementasi Program Kampus Mengajar Pada Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Student Journal of Educational Management*, 3(September), 120–132. <https://doi.org/10.37411/sjem.v3i2.1330>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Putri, R. M., Sari, R., Hasanah, U., Habibillah, Z., Formal, P. N., Pendidikan, F. I., & Padang, U. N. (2024). *Manfaat dan Kesenjangan Alat Pendidikan di Era Digital*. 2(1).
- Rafid, R., Supriadi, Fikri, M. H., Hidayat, A. T., & Nurita, R. F. (2024). Desentralisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Journal on Education*, 7(1), 6729–6742.
- Rahman Tanjung, Hanafiah, Opan Arifudin, D. M. (2022). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Journal of Educational Research*, 1(1), 85–100. <https://doi.org/10.56436/jer.v1i1.16>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2021). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84. <https://doi.org/10.52300/jepv3i2.11379>
- Saputra, I., & Ahmad, R. (2022). Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi). *Keguruan : Jurnal Penelitian, Pemikiran, Dan Pengabdian*, 10(2), 66–70.
- Sari, D. R., & Trisoni, R. (2023). Implementasi Desentralisasi Pendidikan di SMA Negeri 6 Batang Hari. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 106–114. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i1.14349>
- Sari, F., & Riansi, E. S. (2024). PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL : TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2023). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 114–132. <https://doi.org/10.15548/thje.v4i2.5650>
- Setiawan, W. (2020). Pendidikan Kebahagiaan di Sekolah: Menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 74–88. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/AL-AUFA/article/view/284>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Siska, F., & Rudagi, R. (2021). Analisis Ketimpangan Pendidikan pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v3i1.2032>
- Sumantri, G., Novianto, M. D., & Prihastuti, P. P. (2023). Implementasi Fuzzy C-Means dalam

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Pengelompokan Provinsi di Indonesia untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Prosiding Seminar Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 8(2721). <https://doi.org/10.21831/pspmm.v8i2.310>

Syed Agung Afandi, M. Fajar Anugerah, M. A. (2023). *Open Government*. (R. Erdayani (ed.)). Erye Art. https://www.researchgate.net/publication/375486230_Open_Government

Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Putra Dinata, Z., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22. <https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i1.3>